



Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Disiplin Kerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Data Statistik

Mochdar Saleh

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan program *statistical capacity building-change and reform for the development of statistics* (STATCAP-CERDAS) terhadap disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan kualitas data statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama menggunakan model analisis kausal efektif dengan meninjau hubungan rasional yang menganalisa hubungan sebab akibat antara implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS terhadap disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan kualitas data statistik. Lokasi penelitian di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Hasil pembahasan menunjukkan implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan kualitas data statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan kualitas data statistik di BPS Kabupaten Garut, dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin kerja pegawai melalui optimalisasi implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS.

Kata kunci: implementasi kebijakan, disiplin kerja pegawai dan kualitas data statistik

1 Pendahuluan

Agenda Reformasi Birokrasi di Indonesia merupakan upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Perubahan tersebut meliputi keseluruhan aspek yang memungkinkan birokrasi memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. Kebijakan Reformasi Birokrasi diatur dalam Peraturan MENPAN No. 15/M.PAN/7/2009, tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. disebutkan bahwa Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM.

Sebagai *booster* Reformasi Birokrasi di BPS, Program STATCAP-CERDAS diharapkan mampu mengubah pola kerja, mindset, budaya kerja serta budaya berpikir SDM di BPS sehingga menjadi aparatur berdisiplin tinggi yang profesional, berintegritas serta amanah dalam mengemban tugas. Tentunya hal tersebut merupakan tugas dengan tantangan yang luar biasa, mengingat dari pengamatan awal menunjukkan bahwa terlalu besar celah (*gap*) antara kondisi saat ini dengan kondisi masa mendatang yang diinginkan. Salah satu pilar yang menjadi prioritas program STATCAP-CERDAS yang akan dibangun adalah ragam dan kualitas data. Implementasi program STATCAP-CERDAS dilakukan untuk mendukung misi BPS dalam mewujudkan visi BPS sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Upaya-upaya pengembangan yang dilakukan BPS, melalui implementasi program STATCAP-CERDAS, sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik dari masyarakat, LSM dan partai politik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra terkait data BPS tersebut merupakan indikasi bahwa kualitas data yang dihasilkan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Ramdhani & Santosa (2012) menyebutkan bahwa dukungan pemerintah memberikan dampak positif terhadap keberhasilan suatu program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Implementasi Kebijakan Program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS) terhadap Disiplin Kerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Data Statistik**” di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

2 Metodologi

Penelitian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi dan/atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu (Ramdhani, 2013). Penelitian menggunakan metode scientific dengan cara pengumpulan data dan uji analisis dari hipotesis (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kuantitatif dengan teknik survei. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena (Iskandar, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan publik.

Kemudian untuk melihat kondisi objektif pada objek penelitian, peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian penelitian yang ditetapkan. Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan verifikasi hasil penelitian dengan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2104), dan Ramdhani et al (2014). Adapun operasionalisasi variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan (Program STATCAP-CERDAS, (Winarno, 2012)	1. Komunikasi	a. Transmisi kebijakan
		b. Kejelasan implementasi kebijakan
		c. Konsistensi implementasi kebijakan
	2. Sumber-sumber	a. Kesiapan Staf
		b. Kelengkapan Informasi
		c. Wewenang
		d. Dukungan fasilitas
	3. Kecenderungan-kecenderungan atau sikap pelaksana	a. Gaji dan Insentif pelaksana
		b. Komitmen pelaksana
		c. Kemampuan dan pemahaman pelaksana
		d. Budaya kerja aparatur

Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Disiplin Kerja Pegawai (Hasibuan, 2016)	4. Struktur birokrasi	a. SOP
		b. Fragmentasi
	1. Ketaatan terhadap aturan waktu	a. Ketepatan terhadap aturan jam kerja
		b. Ketepatan waktu melaksanakan tugas
		c. Ketaatan terhadap peraturan pekerjaan
	2. Ketaatan terhadap peraturan pekerjaan	a. Kepatuhan terhadap aturan kerja
		b. Kepatuhan terhadap pimpinan
		c. Kepatuhan terhadap standar prosedur kerja
	3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan	a. Berperilaku sesuai nilai dan norma saat bertugas
b. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya		
c. Melakukan pekerjaan sesuai rencana		
d. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan		
Kualitas Data Statistik (Sutabri, 2012)	1. Bebas dari kesalahan	a. Konsisten
		b. Jelas
		c.
	2. Tepat waktu / <i>Timelines</i>	a. Tidak terlambat
		b. <i>Up To date</i>
	3. Relevan / <i>Relevance</i>	a. Nilai manfaat
		b. Biaya

Karena seluruh pegawai BPS Kabupaten Garut memiliki kontribusi terhadap kualitas data statistik, maka populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di BPS Kabupaten Garut dengan jumlah sebanyak 48 orang dengan perincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Populasi penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	6 orang
3	Staf dan KSK (Pelaksana)	41 orang
Jumlah		48 orang

Sumber: BPS Kabupaten Garut 2015

Untuk lebih mendapatkan data yang mewakili, serta karena populasi berjumlah relatif kecil maka dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik penarikan sampel dengan metode sensus dimana peneliti langsung menetapkan seluruh populasi sebanyak 48 orang sebagai responden penelitian.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Fenomena paradigma manajemen perubahan BPS-RI yang dimotori program STATCAP-CERDAS berimplikasi kepada manajemen lembaga teknis daerah seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, sebagai lembaga teknis daerah secara kelembagaan, berdasarkan kepada Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang BPS provinsi, BPS Kabupaten/kota, merupakan bagian integral dari BPS-RI secara keseluruhan yang menjamin koodinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Terkait dengan permasalahan statistik di BPS Kabupaten Garut tidak luput dari berbagai macam kendala yang dihadapi, sebagai gambaran BPS Kabupaten Garut telah merumuskan sasaran strategis, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan/ Sasaran Strategis BPS Kabupaten Garut Tahun 2015

Tujuan/ Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)	Realisasi (5)
1. Peningkatan kualitas data statistik				
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	80	60
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	62	55
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	80
	Jumlah release data statistik yang tepat waktu	Aktivitas	2	2
	Jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	86	14
	Jumlah publikasi/ laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	1	1
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	100
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100	90
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	100	85

Tabel 3. Tujuan/ Sasaran Strategis BPS Kabupaten Garut Tahun 2015

Tujuan/ Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)	Realisasi (5)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic				
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	84	75
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	1.300	1.200
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	78	67
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	70	58
3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel				
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	85	75
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	35	27
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	80	60

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2015

Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi pencapaian sasaran strategis BPS kabupaten Garut tahun 2015. Pencapaian target terendah yaitu pada jumlah publikasi/ laporan statistik yang terbit tepat waktu. Kondisi tersebut menunjukkan kinerja sumber daya dan lembaga yang masih relatif rendah. Berdasarkan capaian realisasi tujuan/ sasaran strategis BPS Kabupaten Garut, peneliti menilai kinerja pegawai BPS Kabupaten Garut masih perlu ditingkatkan. Adanya permasalahan yang disampaikan di atas menunjukkan manajemen perubahan, melalui pelaksanaan program STATCAP-CERDAS di BPS-RI, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perubahan perilaku dan budaya kerja pegawai yang diharapkan belum optimal, hal ini tercermin dari efektivitas kerja pegawai, baik dilihat dari sisi ketepatan waktu tepat maupun pemenuhan target. Selanjutnya, dari hasil observasi, tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena sosialisasi yang belum berjalan baik sehingga terjadi perbedaan persepsi diantara pegawai, bahkan masih ada yang sama sekali tidak mengetahui. Sistem SDM di BPS, terkait jenjang karir, reward dan punishment, belum mampu mendorong motivasi pegawai untuk berprestasi. Sebagian pegawai masih senang bekerja pada zona nyaman sehingga cenderung menolak perubahan. Hal selaras dengan pendapat Nurfajrinah et. al., (2017), yang menyatakan bahwa hal mempengaruhi

produktivitas kerja pegawai adalah motif yang mendorong seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, dapat dilakukan proses difusi inovasi pada bidang pekerjaan, yang dilakukan melalui tahapan penguatan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi (Ramdhani, Aulawi, Ikhwana, & Mauluddin, 2017)

Selanjutnya, fenomena masalah yang juga cukup berpengaruh terhadap terwujudnya kualitas data statistik di BPS Kabupaten Garut adalah pencapaian realisasi dan ketepatan pemasukan dokumen survei-survei oleh pegawai-pegawai lapangan. Kedisiplinan kerja pegawai dalam memenuhi jadwal yang telah ditentukan tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat realisasi dan ketepatan waktu pemasukan dokumen dari jadwal yang telah ditentukan. Tabel berikut merupakan gambaran target dan realisasi pemasukan beberapa kegiatan rutin di BPS Kabupaten Garut tahun 2015.

Tabel 4 Target dan Realisasi Pemasukan Dokumen Beberapa Kegiatan Rutin di BPS Kabupaten Garut Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Target	Realisasi					
			Tepat Waktu	%	Terlambat	%	Tidak Masuk	%
A. Survei Bulanan								
1.	HPB	120	108	90	12	10	0	0
2.	VHTS	576	372	65	120	21	84	15
3.	HPS/HPK/HPT	444	264	59	108	24	72	16
4.	HPG	120	96	80	24	20	0	0
5.	HPBG	36	36	100	0	0	0	0
6.	HD	312	240	77	60	19	12	4
7.	HKD	180	132	73	48	27	0	0
8.	IBS	36	24	67	8	22	4	11
Rata-rata				70		21		9
B. Survei Triwulan								
1	STKU	12	8	67	3	25	0	0
2	IMK	664	472	71	192	29	0	0
Rata-rata				71		29		0
C. Survei Tahunan								
1	VHTL	122	94	77	22	18	6	5
2	K 3	42	31	74	9	21	0	0
3	KOPERASI	30	22	73	8	27	0	0
4	VKBP	125	86	69	39	31	0	0
5	P2TIK	101	91	90	10	10	0	0
6	POLDIS	24	24	100	24	100	0	0
7	IMK	452	330	73	122	27	0	0
8	IBS	187	157	84	30	16	0	0
Rata-rata				77		24		1
D. Publikasi Kecamatan								
1	KCDA	42	12	29	30	71	0	0
2	STATDA	42	12	29	30	71	0	0
Rata-rata				29		71		0

Sumber: BPS Kabupaten Garut 2015

Tingkat pemasukan dokumen survei yang terlambat/ tidak tepat waktu masih cukup tinggi, bahkan masih ada target survei yang tidak terealisasi. Kegiatan rutin BPS Kabupaten Garut yang tampak masih cukup memprihatinkan adalah pada kegiatan survei bulanan yang tercatat masih cukup tinggi target pekerjaan yang tidak terealisasi, terutama untuk kegiatan survei HPS/ HPK/ HPT sebesar 16%, sedangkan yang terlambat mencapai angka 24%. Hal tersebut merupakan indikasi dari lemahnya etos kerja dan rendahnya disiplin kerja dari pegawai untuk mentaati aturan penjadwalan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Fakta berikutnya yang merupakan masalah kedisiplinan kerja pegawai di BPS Kabupaten Garut adalah kehadiran pada rapat dinas yang diselenggarakan pada awal bulan. Rapat dinas merupakan momen penting yang merupakan ajang evaluasi dan perencanaan kegiatan-kegiatan rutin bulanan. Kehadiran pegawai dalam rapat tersebut sangat penting untuk terprogramnya dan kelancaran kegiatan-kegiatan BPS secara menyeluruh. Tabel 5 menyajikan rekapitulasi absensi kehadiran dalam rapat dinas dan penyelesaian target pekerjaan pegawai BPS Januari-Desember 2015:

Tabel 5. Absensi Rapat Dinas Pegawai BPS Kabupaten Garut Tahun 2015

No.	Bulan	Hadir (%)	Terlambat (%)	Mangkir (%)
1.	Januari	70	7	30
2.	Februari	75	13	25
3.	Maret	88	3	13
4.	April	80	0	20
5.	Mei	80	6	20
6.	Juni	80	0	20
7.	Juli	95	3	5
8.	Agustus	98	8	3
9.	September	88	11	13
10.	Oktober	80	3	20
11.	November	85	3	15
12.	Desember	68	4	33

Sumber: BPS Kabupaten Garut 2015

Tabel 5. menunjukkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rapat dinas yang diselenggarakan di awal bulan selama 1 tahun periode Januari-Desember 2015. Pegawai tidak hadir dalam rapat dinas tertinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan yang terendah adalah pada bulan Agustus. Tidak ada sanksi tegas dari instansi menyebabkan pegawai merasa hal yang wajar apabila tidak hadir rapat tanpa memberitahu alasannya. Selalu adanya ketidakhadiran dari bulan Januari sampai Desember menunjukkan adanya permasalahan disiplin kerja pegawai.

Fenomena masalah lain yang menghambat terwujudnya kualitas data di BPS Kabupaten Garut terkait dengan rendahnya disiplin kerja pegawai adalah ketidakpatuhan petugas lapangan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan-temuan terdahulu, peneliti pernah menemukan beberapa petugas yang tidak melaksanakan survei-survei sesuai dengan pedoman (SOP) yang harus diikuti seperti pada survei ubinan, sakernas, susenas yang mewajibkan adanya pendaftaran rumahtangga diwilayah kerjanya. Petugas tersebut tidak melakukan pendaftaran/ pendataan rumahtangga dengan benar, bahkan sampai dengan tidak mengunjungi responden (hanya menanyakan pada sumber tertentu), atau langsung mengisi kuesioner daftar rumahtangga di atas meja berdasarkan survei-survei sebelumnya. Perbuatan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan pengambilan sampel rumahtangga pada pelaksanaan survei. Tentunya dengan

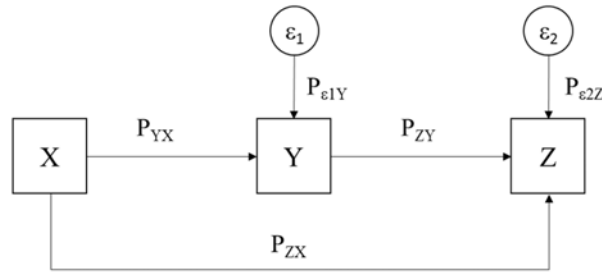
kesalahan sampel, maka akan terjadi pula kesalahan dalam estimasi tentang suatu parameter tertentu. Untuk penguatan ketaatan terhadap SOP, peneliti merekomendasikan agar setiap prosedur dapat ditempatkan dalam suatu portal pengetahuan. Portal pengetahuan dapat membuat orang lebih efektif dalam proses pembelajaran, dengan memberikan mereka informasi yang tepat yang dibutuhkan. Portal pengetahuan yang dirancang menyimpan informasi yang terstruktur (Pamoragung et. al., 2006).

Fenomena masalah yang diungkapkan di atas sangat terkait erat dengan Ilmu Administrasi Negara. Goodnow dalam Iskandar (2016) menjelaskan bahwa Administrasi Negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Selanjutnya, Waldo (dalam Iskandar, 2016) memberikan definisi administrasi negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik, Gordon (dalam Iskandar, 2016).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, sedangkan tertentu Ramdhani & Ramdhani (2017) mendefinisikan pelaksanaan kebijakan publik sebagai implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Manajemen perubahan pada implementasi kebijakan Program STATCAP-CERDAS pada dasarnya bertujuan untuk mengubah pola kerja, budaya kerja serta budaya berpikir SDM di BPS sehingga menjadi aparatur dengan etos dan disiplin kerja tinggi yang profesional, berintegritas serta amanah dalam mengemban tugas. Budaya kerja akan mempengaruhi komitmen pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya (Ramdhani et. al., 2017).

Hasibuan (2016) menjelaskan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku, maka semakin baik disiplin karyawan akan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Dengan demikian disiplin yang tinggi akan mendorong kualitas output yang dihasilkan oleh pegawai. Terkait output BPS, maka kedisiplinan pegawai akan mendorong perwujudan kualitas data statistik yang dihasilkan, karena Sinambela (2014) yang mengatakan bahwa kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai.

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai pada Puskesmas di Kabupaten Garut. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang dapat memperlihatkan relasi antar variabel (Amin & Ramdhani, 2006). Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada tabel Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penghitungan Analisa Statistika

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X → Y → Z Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Displin Kerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Data Statistik	0.7295	16.6855	3.2093	0.5322	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinan	Makna Hubungan
X → Y Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Displin Kerja Pegawai	0.7679	8.1743	2.0154	0,5923	Signifikan
X → Z Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Kualitas Data Statistik	0.4260	2.6379	2.0154	0,2959	Signifikan
Y → Z Pengaruh Displin Kerja Pegawai terhadap Kualitas Data Statistik	0.3491	2.4920	2.0154	0,2363	Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersaji pada Tabel 2., maka diperoleh hasil penelitian bahwa secara simultan maupun parsial Pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang Puskesmas dan dukungan sarana prasarana berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap

manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai pada Puskesmas di Kabupaten Garut

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Disiplin Kerja Pegawai dalam Mewujudkan Kualitas Data Statistik ($X \rightarrow Y \rightarrow Z$)

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien jalur X terhadap Y dan Z sebesar **0.7295**. kemudian dilakukan pengujian dengan melihat nilai F_{hitung} dan membandingkannya dengan nilai F_{tabel} . Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai $F_{\text{hitung}} = 16.6855 > F_{\text{tabel}} = 3.2093$. Disimpulkan bahwa H_0 **ditolak**, artinya variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan kualitas data statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, dengan *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar **0.5322**.

Nilai-nilai di atas menunjukkan bahwa pengaruh total implementasi kebijakan (X) terhadap terhadap disiplin kerja pegawai (Y) dalam upaya mewujudkan kualitas data statistik di Kabupaten Garut (Z) sebesar **53.22%** dan sisanya variabel sebesar **46.78%** dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti (*epsilon*). Sehingga dari perhitungan tersebut diketahui bahwa implementasi kebijakan secara signifikan akan berdampak terhadap pola dan budaya kerja pegawai, yang berdampak pada disiplin kerja pegawai yang tinggi, maka implikasi dari kondisi tersebut adalah terwujudnya kualitas output dari aktivitas BPS Kabupaten Garut yang berupa data/informasi statistik.

Dari hasil observasi, *epsilon* yang diduga turut mempengaruhi kualitas data statistik di BPS Kabupaten Garut, sebesar 46,78%, antara lain diduga karena kompetensi statistik dari pegawai yang belum merata, manajemen survei yang belum optimal, beban kerja petugas yg tinggi, sistem SDM di BPS yang belum optimal, *respondent burden* karena perangkat hukum yang masih lemah, koordinasi dengan Lembaga Pemerintah lain yang masih kurang optimal, dan lain sebagainya.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Disiplin Kerja Pegawai ($X \rightarrow Y$)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar **0.7696**. Kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $= 8.1743$ sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154 . karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 **ditolak**, artinya implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan tersebut terhadap disiplin kerja pegawai, dari koefisien diterminasi, sebesar **59.23%**, sedangkan sisanya **40.77%** dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kebijakan yang tidak dimasukkan kedalam model (*epsilon*). Dari hasil observasi, variabel *epsilon* yang diduga ikut mempengaruhi antara lain, budaya organisasi (Ramdhani et al, 2017), motif pekerja (Nurfajrinah et. al., 2017), tipe kepemimpinan, manajemen sumberdaya manusia, sistem pengawasan, sanksi hukuman, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

Kebijakan program reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik melalui program STATCAP-CERDAS pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Selain sebagai tahapan proses sebagaimana disebutkan di atas implementasi kebijakan program juga membutuhkan kejelasan dari pihak yang akan melaksanakan kebijakan itu dan pilihan pada teknik implementasi. pedekatan pertama pada seputar siapa melaksanakan pelaksana atau para pihak yang terlibat dalam implementasi untuk menerapkan pelayanan, secara umum tugas implementasi kebijakan adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini selaras dengan pendapat Anderson (dalam Iskandar, 2016) adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Sebagai sebuah perangkat baru, program STATCAP-CERDAS agar dapat diterima dengan baik oleh pegawai BPS, program program STATCAP-CERDAS sebaiknya dilakukan proses difusi inovasi (Ramdhani, et. al., 2017), yang dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang diformulasikan melalui empat tahapan utama yakni:

- a. Pengetahuan: mengetahui adanya inovasi dan memiliki pengertian bagaimana inovasi tersebut berfungsi.
- b. Persuasi: menentukan sikap suka atau tidak suka terhadap inovasi tersebut.
- c. Keputusan: terlibat dalam kegiatan yang membawa seseorang pada situasi memilih apakah menerima atau menolak.
- d. Konfirmasi: mencari penguat bagi keputusan yang telah diambil sebelumnya. Jika informasi yang diperoleh bertentangan maka seseorang dapat merubah keputusan tersebut.

Peneliti merekomendasikan implementasi teknologi informasi dalam bentuk e-government untuk membantu pekerjaan BPS. Teknologi informasi merupakan perangkat teknologi yang dapat membantu manusia dalam pekerjaannya, dengan mengelola data secara terpelihara, cepat, tepat, dan akurat (Tsabit et. al., 2012; Bustomi et al., 2012; Ramdhani et al., 2016; Slamet et. al., 2016; Ramdhani et al., 2006) di saat diperlukan untuk pengambilan keputusan

3.2.3. Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Program STATCAP-CERDAS terhadap Kualitas Data Statistik ($X \rightarrow Z$)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien jalur ρ_{zx} sebesar **0.4062**. kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,4260 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas data di BPS Kabupaten Garut.

Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa Implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas data statistik. Besar pengaruh secara langsung variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS terhadap kualitas data statistik adalah **18.15%** sedangkan pengaruh implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS terhadap kualitas data statistik melalui disiplin kerja pegawai adalah sebesar **11.44%**. Sehingga jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS terhadap kualitas data statistik sebesar **29.59%** sedangkan sisanya sebesar **70.41%** di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program (STATCAP-CERDAS) memberikan pengaruh signifikan dan positif, namun didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap kualitas data statistik, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas data statistik seperti yang telah dibahas sebelum.

Sebagai organisasi publik yang memiliki fungsi menyediakan data, maka syarat perlu bagi mutu pelayanan di BPS adalah kualitas data yang dihasilkan. Pelayanan BPS terhadap masyarakat akan dinilai tidak bermutu jika data statistik yang dihasilkan tidak berkualitas, karena akan menyebabkan informasi yang digunakan pengguna data (masyarakat) tidak akurat dan menyesatkan. Dengan demikian, kualitas data statistik akan menjadi sebuah tolak ukur kinerja pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik. Masyarakat secara langsung dapat mengidentifikasi dan menilai kinerja lembaga pemerintah berdasarkan jumlah dan mutu layanan publik yang diterima, karena kuantitas dan kualitas pelayan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat sebagai pengguna jasa. Keberhasilan pemerintah dalam membangun kinerja pelayanan publik secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel pada gilirannya nanti akan berdampak lurus terhadap kepuasan masyarakat. Mukarom & Laskana (2015) memperkuat dengan pendapat bahwa masyarakat sebagai pelanggan pelayan publik memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Adapun pemerintah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

3.2.4. Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai terhadap Kualitas Data Statistik ($X \rightarrow Y$)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi antara variabel x dan y (r_{xy}) adalah sebesar 0,6769 dengan koefisien jalur (ρ_{zy}) sebesar **0.3491**. Kemudian dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.4920 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.0154. Dengan demikian, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka **H_0 ditolak**, artinya disiplin kerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Data Statistik di BPS Kabupaten Garut.

Selanjutnya, besar pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap Kualitas data statistik (determinasi) tercatat sebesar **23,63** persen. Sedangkan sisanya **76,37%** adalah pengaruh variabel *epsilon* yang tidak dimasukkan kedalam penelitian. Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan, namun didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap kualitas data statistik, hal ini karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas data, seperti telah dibahas sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kinerja pegawai belum optimal dalam upaya mewujudkan kualitas data yang diproduksi BPS. Kendati demikian, meskipun dengan persentase determinasi yang rendah, namun pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas output BPS, dalam hal ini data/ informasi statistik, merupakan faktor kunci, atau merupakan syarat yang mutlak diperlukan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Hasibuan (2016) bahwa tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian disiplin harus menjadi ruh bagi setiap pegawai BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian. Peningkatan kualitas data harus dilakukan pada seluruh tahapan dalam memproduksi data, yang dimulai dari tahap pengumpulan,

pengolahan, penyajian sampai dengan diseminasinya. Sehingga hal yang perlu disadari adalah semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses tersebut harus bertanggung jawab terhadap kualitas data yang dihasilkan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja pegawai dalam mewujudkan kualitas data statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pegawai, variabel implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas data statistik, dan Variabel disiplin kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas data statistik di Badan Pusat Statistik kabupaten Garut. Berdasarkan hasil-hasil pengujian hipotesis di atas maka penelitian ini berkesimpulan bahwa “untuk mewujudkan kualitas data statistik di BPS Kabupaten Garut, dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin kerja pegawai melalui optimalisasi implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS.

Kemudian disarankan kepada pihak terkait yakni pertama, terkait implementasi kebijakan program STATCAP-CERDAS yang belum optimal, maka disarankan agar kepala BPS Kabupaten Garut hendaknya membuat program pemberdayaan institusional dan eksplorasi sumber-sumber yang ada untuk membenahan organisasi secara menyeluruh. Kedua, terkait pengelolaan metode kerja, kurangnya loyalitas kerja, maka disarankan kepada BPS Kabupaten Garut agar menyusun agenda pembinaan internal pegawai di luar pembinaan dan pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi atau BPS Pusat. Ketiga, terkait permasalahan pada kualitas data di BPS Kabupaten Garut yang masih kurang optimal, maka disarankan agar segera merumuskan pengembangan metode yang lebih baik dan mampu menggambarkan parameter yang diukur, mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun dan dapat disajikan sampai pada level wilayah terkecil.

Daftar Pustaka

- Amin, A. S., & Ramdhani, M. A. (2006). Konfigurasi Model untuk Sistem Pendukung Keputusan. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*, 16(1), 11-19.
- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1-7.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, J. (2016). *Indek dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Perilaku Manusia dalam Kelompok Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurfajrinah, M. A., Nurhadi, Z. F., & Ramdhani, M. A. (2017). Meaning of Online Shopping for Indie Model. *The Social Sciences*, 12(4), 737-742.

- Pamoragung, A., Suryadi, K., & Ramdhani, M. A. (2006). Enhancing the Implementation of e-Government in Indonesia through the High-Quality of Virtual Community and Knowledge Portal. *6th European Conference on e-Government* (pp. 341-347). Marburg: Academic Conferences Limited.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development. *International Journal of Basic and Applied Science*, 1(1), 7-13.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Ramdhani, M. A., & Wulan, E. R. (2012). The Analysis of Determinant Factors in Software Design for Computer Assisted Instruction. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 1(8), 69-73.
- Ramdhani, M. A., Aulawi, H., Ikhwana, A., & Mauluddin, Y. (2017). Model of Green Technology Adaptation in Small and Medium-Sized Tannery Industry. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12(4), 954-962.
- Ramdhani, M. A., Suryadi, K., & Susantosa, P. (2006). Telematic Policy Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-indonesia. *Journal of Applied Sciences Research*, 2(1), 58-66.
- Sinambela. L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, C., Rahman, A., Ramdhani, M. A., & Darmalaksana, W. (2016). Clustering the Verses of the Holy Qur'an using K-Means Algorithm. *Asian Journal of Information Technology*, 15(24), 5159-5162.
- Sutabri, T. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Pengembangan Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal. *Jurnal Algoritma*, 9, 1-10.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Study Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.